



Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara

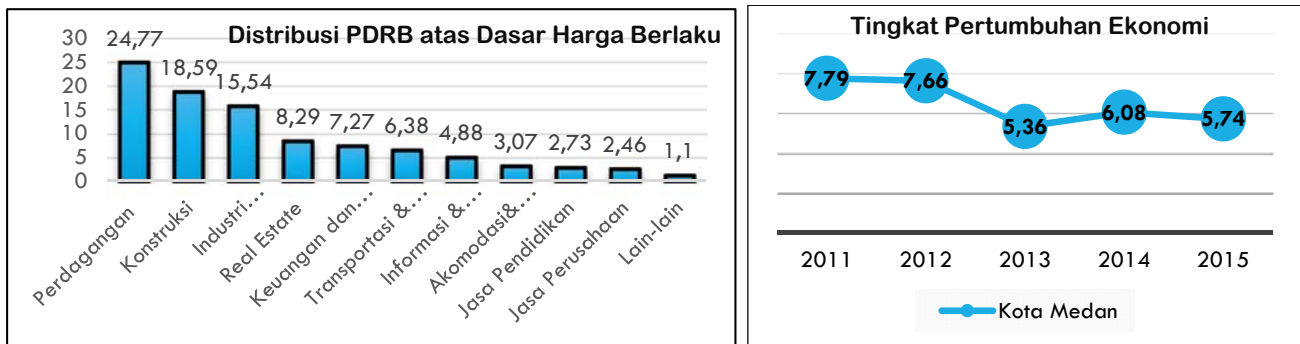
Walikota : Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S, M.Si
 Ibukota : Medan
 Luas Wilayah : 265,10 km²
 Jumlah Penduduk : 2.210.624



Kinerja Ekonomi

- Struktur ekonomi Kota Medan didominasi oleh sektor perdagangan, konstruksi, industri dan real estate, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Sementara kontribusi sektor usaha lain masih di bawah 3%.
- Pertumbuhan ekonomi Kota Medan cenderung berada di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Sumut hanya mencapai 5,1%, di bawah Kota Medan yang mencapai 5,74%.

Gambar 1. Kinerja Ekonomi Kota Medan

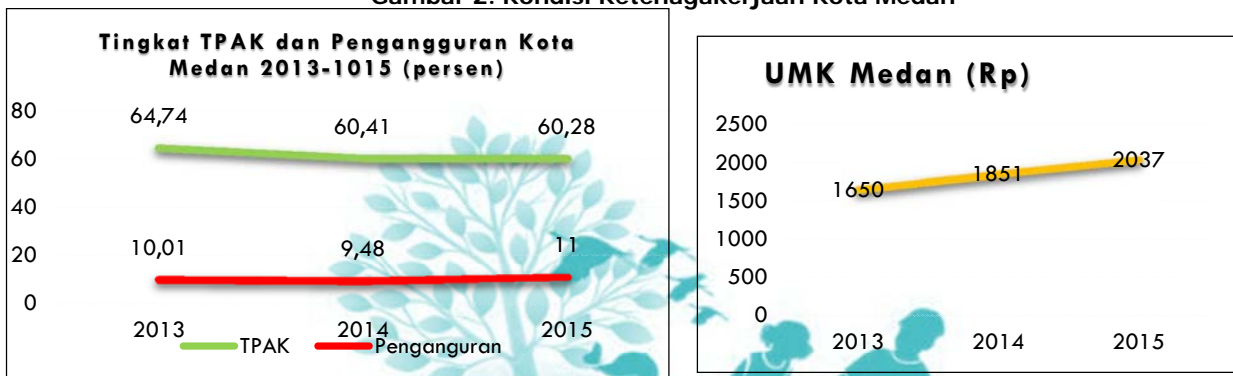


Sumber: BPS Kota Medan, diolah

Ketenagakerjaan

- Dari total usia produktif (15 tahun ke atas), sebanyak 60,28% penduduk kota Medan termasuk angkatan kerja. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan dua tahun lalu yang mencapai 64,74 persen. Sementara tingkat pengangguran berada pada kisaran 9-11% dalam tiga tahun terakhir.
- Upah Minimum Kota (UMK) Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam penentuan upah ini, Pemda dinilai tidak melibatkan para pelaku usaha (TKED 2016).

Gambar 2. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Medan



Sumber: BPS Kota Medan, diolah

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan menjadi faktor penunjang penting dalam pembangunan investasi. Pemkot Medan sudah membangun jalan sepanjang 3.771,74 km.

Gambar 3. Kondisi Infrastruktur Jalan Medan 2014 (Km)

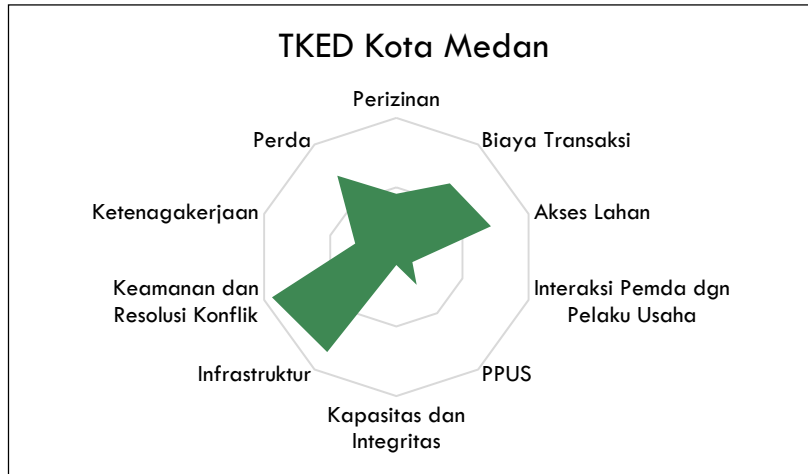


Sumber: BPS Kota Medan, diolah

Potensi Investasi

Kota Medan berpotensi menjadi pusat perekonomian daerah dan regional utama di Pulau Sumatera. Potensi ini tampak dari dukungan beberapa faktor antara lain: (1) 60,8% industri perbankan memilih lokasi di Kota Medan; (2) 84,8% kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; (3) Usaha industri terus berkembang baik berskala usaha besar, sedang maupun kecil; (4) ketersediaan kawasan-kawasan industri; (5) berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan lain-lain. PDRB 2015 sendiri sudah menggambarkan potensi-potensi tersebut. Sektor-sektor yang patut dikembangkan antara lain perdagangan, konstruksi, industri dan real estate, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi.

Profil Tata Kelola Ekonomi Daerah



Sumber: TKED, KPPOD, 2017

Nilai Sub Indeks Kota Pontianak

1. Perizinan	: 45.41
2. Biaya Transaksi	: 65.45
3. Akses Lahan	: 71.56
4. Interaksi Pemda-Pelaku Usaha	: 12.11
5. PPUS	: 24.76
6. Kapasitas dan Integritas	: 5.82
7. Infrastruktur	: 84.54
8. Keamanan dan Resolusi Konflik	: 94.02
9. Ketenagakerjaan	: 31.12
10. Peraturan di Daerah	: 72.18

Kota Medan menempati peringkat terendah dalam indeks TKED 2016. Mayoritas sub-indeks menempati peringkat paling bawah seperti perizinan (45), PPUS (24,76), kapasitas dan integritas kepa (5,82), dan Ketenagakerjaan (31), dsb.

Perizinan Usaha

Kota Medan menempati peringkat kedua terbawah (45). Sebanyak 75% menganggap biaya perizinan masih mahal; 46,43% pelaku menganggap proses perizinan masih lama dan hanya 35% yang memiliki TDP; 36% pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan PTSP. Keberadaan mekanisme pengaduan juga hanya diketahui 69,23% pelaku usaha. Saat ini, Medan hanya melimpahkan 11 izin kepada PTSP dan masih ada 23 izin yang belum dilimpahkan oleh SKPD teknis.

Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)

Kota Medan menempati peringkat terbawah (24,76). Nilai ini sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (60,59). Rendahnya indeks yang diperoleh Kota Medan disebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui akan keberadaan PPUS yakni sekitar 40-93% untuk semua jenis kegiatan PPUS. Hanya kegiatan promosi produk lokal, pelatihan mengajukan akses kredit, dan program bantuan finansial yang banyak diketahui oleh pelaku usaha yakni masing-masing diketahui 40% pelaku usaha. Selain itu, tidak ada pelaku usaha khususnya UMKM yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan PPUS.

Kapasitas dan Integritas

Medan menduduki peringkat terendah (5,82). Pelaku usaha beranggapan bahwa Walikota melakukan perbuatan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (76%), tidak tegas terhadap korupsi bawahannya (88%), bukan figur yang disegani (64,71%), dan tidak memiliki rencana strategis untuk pengembangan dunia usaha (84.37%).

Ketenagakerjaan

Kota Medan menempati peringkat lima terbawah (31,12). Meski pelaku usaha mudah mendapatkan tenaga kerja namun, seluruh pelaku usaha menilai tidak dilibatkan dalam proses penentuan upah dan hanya 40,39 % pelaku usaha yang menganggap Pemda memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav.9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. (021) 8378 0642, Fax (021) 8378 0643, Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org